



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI 2016-2021**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAMBI**

Jln. MT. Haryono No. 09 Telanaipura – Jambi

## Kata Pengantar

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada RPJMD daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021. Dengan demikian, dokumen RENSTRA ini merupakan dokumen RENSTRA ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program untuk mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang selaras dengan tujuan pembangunan Provinsi Jambi.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat Visi, Misi Tujuan, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang selaras dengan Visi Misi Gubernur Jambi yaitu mewujudkan JAMBI TUNTAS 2021.

Semoga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi ini dapat menjadi pedoman dan acuan 5 (lima) Tahun kedepan dalam upaya bersama membangun sektor Kelautan dan Perikanan lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi tidak lupa disampaikan kepada seluruh pihak terutama aparatur yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.

Jambi, Juli 2018

**KEPALA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAMBI**

**TEMAWISMAN, S.Pi**

Pembina TK. I

NIP. 19681021 199903 1 003

# DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	I
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah .....	40
<b>III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2016 – 2021.....	46
3.3. Telaahan Renstra Kementerian.....	53
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	58
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	59

<b>IV</b>	<b>TUJUAN DAN KEBIJAKAN</b>	
	4.1. Tujuan dan Sasaran .....	62
	4.2. Strategi dan Kebijakan .....	64
<b>V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	73
<b>VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	84
<b>VII</b>	<b>PENUTUP</b>	86

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, pada pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) yang berbunyi : Rencana Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah serta ayat (3) yang berbunyi : Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Kemudian juga dipertegas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 273 ayat (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan serta pada ayat (2) yang berbunyi : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Permasalahan Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dihadapi Provinsi oleh Jambi antara lain : Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan, Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki tertinggal jauh dengan nelayan asing yang masuk ke perairan Jambi, Masih rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga pembudidaya ikan belum mencapai skala usaha, Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestariannya, Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, karena belum tersedianya *coldstorage* untuk penyimpanan dan angkutan perikanan tersebut ke daerah pemasaran, Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, *cold storage*, jenis alat tangkap, Merebaknya pencurian ikan dan terjadinya *over fishing*, serta pola penangkapan yang merusak ekosistem pesisir dan laut, Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas, Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan, Terbatasnya tenaga

penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut : Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kelautan dan Perikanan serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi tersebut dituangkan kedalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan pejabat dan staf Perangkat Daerah yang bersangkutan yang mempunyai waktu dan kemampuan teknis yang cukup serta menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah.
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.
3. Penyusunan agenda kerja tim Renstra Perangkat Daerah disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran KDH hingga verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan musrenbang.

4. Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra antara lain : Peraturan perundang-undangan yang terkait, Kebijakan pemerintah yang terkait, Dokumen-dokumen (RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD provinsi; RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota; Hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah periode lalu), Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.
5. Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah
6. Penyajian Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disusun dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021 yang telah dibuat secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya.

Dari beberapa Misi yang tertuang dalam Jambi TUNTAS 2016-2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai keterkaitan pada beberapa Misi, antara lain :

- a) Misi ke 3 (tiga) yaitu Menjaga situasi yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat yang selaras dengan prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan yang meningkatkan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir.

- b) Misi ke 4 (empat) yaitu Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan yang didukung dengan prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap (Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Perizinan serta Sumberdaya Manusia di Bidang Perikanan Tangkap terutama nelayan), di Bidang Perikanan Budidaya (Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungannya, Kelompok Pembudidaya Ikan maupun Usaha pembudidaya ikan serta Sumberdaya Manusia Pembudidaya Ikan terutama pembudidaya ikan tersebut), di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Mutu, Kualitas hingga Sumberdaya Manusia Pengolah dan Pengelola Produk Hasil Perikanan tersebut).
- c) Misi ke 5 (lima) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan selaras dengan prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan di Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan (peningkatan Konservasi, Pengembangan wilayah pesisir serta peningkatan pertumbuhan Kelompok-Kelompok Masyarakat Pengawas baru), di Bidang Perikanan Budidaya (Pertumbuhan Minapolitan-minapolitan budidaya perikanan baru dan Meningkatnya Kesehatan ikan dan Lingkungannya), di Bidang Perikanan Tangkap (Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Minapolitan perikanan tangkap, Peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan), di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (pembangunan pasar

ikan-pasar ikan baru).

- d) Misi ke 6 (enam) Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal selaras dengan prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (peningkatan daya saing dan pertumbuhan UMKM perikanan), di Bidang Perikanan Budidaya (Peningkatan pertumbuhan Kelompok Pembudidaya Ikan), di Bidang Perikanan tangkap (Meningkatnya pertumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUB)), di Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Meningkatkan pemberdayaan wanita pesisir).

Dalam mendukung usaha tersebut maka arah pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Tahun 2016-2021 dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk Tahun 2016-2021 serta mendukung Jambi TUNTAS 2021.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 didasarkan dan berpedoman kepada :

1. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005 – 2025.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010 – 2014.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Perda Nomor 16 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tanggal 10 Desember 2008.
8. Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025.
9. Visi Misi Gubernur Terpilih.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Sesuai dengan hierarki Sistem Perencanaan Pembangunan, maka Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dijabarkan dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja Tahunan serta menjadi acuan dan pedoman bagi unit-unit kerja di bawah struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan merupakan tolok ukur dalam menilai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Diharapkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 - 2021 ini dapat membantu dan mengakomodir Visi dan Misi Pemerintahan baik di Tingkat Pemerintah Pusat melalui Nawacita maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan Visi “Jambi Tuntas 2021” agar tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

### **II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2016 – 2021

3.3 Telaahan Renstra Kementerian

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

**V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**VII. PENUTUP**

## II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

#### 2.1.1. Tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Pada pasal 3 berbunyi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, pengawasan dan penguatan daya saing produk;

5. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikannya oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menjalankan tugas dan pokok dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibantu oleh 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang serta 3 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang membawahi sub bagian/seksi yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing.

1. Sekretariat, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu pada subbag umum, keuangan, aset, kepegawaian, program dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Pengelolaan fungsi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi serta pelaksanaan pada Subbagian umum, keuangan dan aset;
  - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas terpadu, pelayanan

administrasi serta pelaksanaan pada Subbagian kepegawaian, program dan pelaporan;

- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan pengelolaan ruang laut, pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap, produksi dan usaha dan pengendalian sumberdaya ikan serta menggali potensi sumberdaya laut serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap;
- Perencanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut;
- Pengkajian dan penerapan teknologi perikanan tangkap;
- Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- Perumusan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan usaha;
- Perencanaan dan pengendalian sumberdaya ikan, melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah perairan kewenangan Provinsi;
- Pengaturan batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan Provinsi dan pengelolaan ruang laut;
- Penyerasian dan pengharmonisan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut; dan

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan, pengembangan, pembinaan sarana, perikanan budidaya, produksi dan usaha budidaya, perbenihan, pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan serta penguatan produksi pakan dan pengembangan teknologi perikanan budidaya yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Perumusan kebijakan teknis bagi pelaku pembudidayaan ikan;
  - Penguatan dan peningkatan produksi pakan dengan menginventarisasi, identifikasi dan analisis data budidaya ikan;
  - Pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan;
  - Perumusan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan usaha budidaya ikan;
  - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan (sumberdaya manusia) SDM bidang perikanan budidaya;
  - Pengkoordinasi, rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
  - Pertimbangan teknis dan rekomendasi perizinan bagi pelaku pembudidaya ikan;
  - Pengembangan teknologi perikanan budidaya;
  - Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan serta pemasaran sumberdaya kelautan dan perikanan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Perencanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengawasan, pelestarian ekosistem perairan dan penataan sumberdaya kelautan;
  - Penegakan peraturan perundang-undangan dan hukum terkait dengan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - Perumusan kebijakan teknis terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta produk hasil perikanan;
  - Pembinaan bagi pelaku pengolahan hasil perikanan guna meningkatkan mutu dan kualitas produk serta pemasarannya;
  - Perumusan kebijakan teknis tentang penataan dan pelestarian ekosistem perairan; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, dan Peraturan

Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terdiri atas :

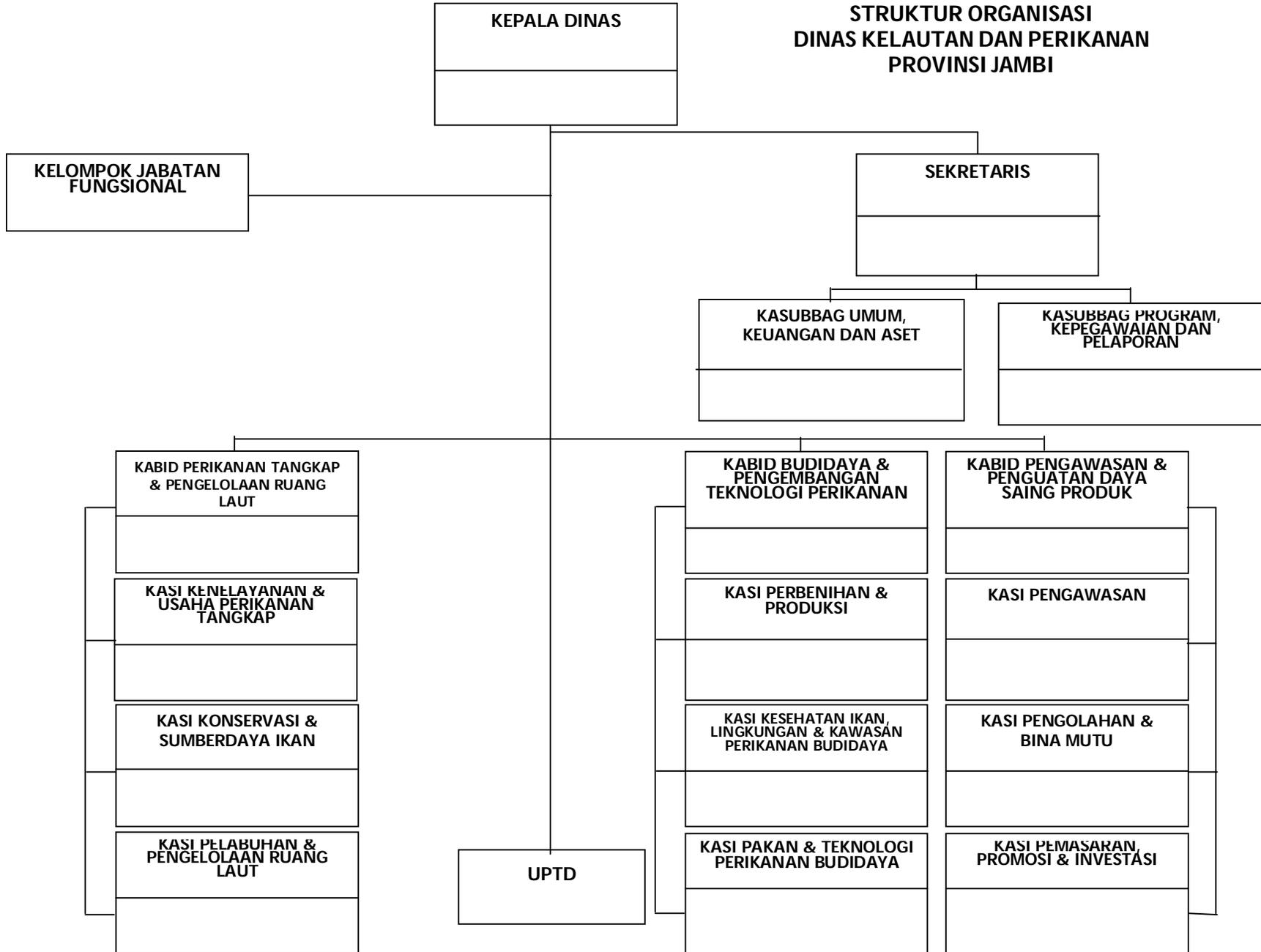
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan
4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut
5. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekretaris, membawahi :
  - Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset
  - Sub Bagian Program, Kepegawaian dan Pelaporan
- b. Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan, membawahi :
  - Seksi Perbenihan dan Produksi
  - Seksi Kesehatan Ikan, Lingkungan dan Kawasan Perikanan Budidaya
  - Seksi Pakan dan Teknologi Perikanan
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut, membawahi :
  - Seksi Kenelayanan dan Usaha Perikanan Tangkap
  - Seksi Konservasi dan Sumberdaya Ikan
  - Seksi Pelabuhan dan Pengelolaan Ruang Laut
- d. Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk, membawahi :
  - Seksi Pengawasan
  - Seksi Pengolahan dan Bina Mutu

- Seksi Pemasaran, Promosi dan Investasi
- e. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal
  - Subbag Tata Usaha
  - Seksi Kesyahbandaran
  - Seksi Pelayanan Usaha Perikanan
- f. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP), membawahi :
  - Subbag Tata usaha
  - Seksi Penerapan Mutu
  - Seksi Usaha Perikanan

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAMBI**



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai SDM sebanyak 345 orang pegawai yang terdiri atas :

1. Pejabat Struktural 24 orang
2. Pelaksana (Staf) 141 orang
3. Tenaga Honorer Kontrak 150 orang

## 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Pada Tahun 2018 jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi 315 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 165, dan pegawai honorer 150 orang yang tersebar di kantor, instalasi dan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai serta Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP), secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah PNS berdasarkan golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.

GOLONGAN	PENDIDIKAN							JUMLAH
	S-2	S-1	D-3	D-4	SLTA	SLTP	SD	
I. A	-	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	1	1
C	-	-	-	-	-	1	-	1
D	-	-	-	-	-	-	-	-
II. A	-	-	-	-	3	-	-	3
B	-	-	-	-	15	-	-	15
C	-	-	-	-	12	-	-	12
D	-	-	3	-	1	1	-	5
III. A	-	23	2	-	3	-	-	28
B	-	26	1	-	8	-	-	35
C	-	23	2	-	-	-	-	25
D	-	27	-	-	-	-	-	27
IV. A	5	1	-	-	-	-	-	6
B	1	5	-	1	-	-	-	7
C	-	-	-	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	8	92	12	1	51	1	2	165
HONORER								150
JUMLAH TOTAL								315

Fasilitas kerja yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi sarana mobilitas, bangunan dan peralatan kantor, sebagai berikut :

- a. Sarana mobilitas terdiri dari :
 

	Kendaraan Roda 6	: 3 unit
	Kendaraan Roda 4	: 27 unit
	Kendaraan Roda 3	: 5 unit
	Kendaraan Roda 2	: 57 unit
	Exavator	: 3 unit
  
- b. Sarana Bagunan terdiri dari :
 

	Bangunan perkantoran, ddl	: 75 unit
	Rumah Dinas	: 21 unit
	Mushalla	: 2 unit
  
- c. Peralatan Kantor terdiri dari :
 

	Komputer	: 52 unit
	Laptop	: 36unit
	Mesin Tik	: 14 unit
	Note Book	: 19 unit
  
- d. Perpustakaan Dinas : 1 unit

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Demi mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, maka selama 5 (lima) tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah melaksanakan Program dan Kegiatan bagi kepentingan masyarakat pada umumnya terutama bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta pelaku usaha perikanan lainnya.

Perkembangan di bidang kelautan dan perikanan selama 5 (lima) tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2011 s/d 2015 dan Tabel. 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Jambi Tahun 2011 s/d 2015 berikut ini :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2011 s/d 2015

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM (2010)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Angka konsumsi ikan perkapita per tahun (perkapita/Thn)	29			31	32	33	34,08	36,09	30,10	31,9	32,76	34	34,7	0,97	1,00	0,99	1,00	0,96
2.	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	50.816			51.774	52.613	53.272	54.349	55.226	51.839,70	54.091,5	55.279,2	55.111,9	50.901,9	1,00	1,03	1,04	1,01	0,92
3.	Jumlah Produksi perikanan budidaya (Ton)	30.289			32.922	42.797	56.064	75.126	105.177	33.908	37.087	44.634,3	51.770	45.438,6	1,03	0,87	0,80	0,69	0,43
4.	Jumlah produksi benih (000)	147.917			190.542	260.357	362.281	465.180	672.185	175.775	120.288,9	148.078,3	181.115,7	166.908,8	0,92	0,46	0,41	0,39	0,25
5.	Pengembangan jumlah kawasan minapolitan (kawasan)	2			6	6	6	7	9	0	5	6	7	7	0,00	0,83	1,00	1,00	0,78
6.	Restocking ikan (ekor)	300.000			300.000	400.000	700.000	900.000	1.000.000	11.000	300.000	625.000	600.000	545.000	0,04	0,75	0,89	0,67	0,55
7.	Suaka perikanan	24			20	20	20	20	20	20	20	21	20	20	1,00	1	1,05	1,00	1,00
8.	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)	403			695	785	887	1.005	1.140	395	726	800	800	1.045	0,57	0,92	0,90	0,80	0,92
9.	Jumlah Pokmaswas	22			29	29	39	46	50	29	35	41	46	53	1,00	1,21	1,05	1,00	1,06
10.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	27.075			29.767	37.398	47.398	53.702	57.886	27.719	28.845	29.436	30.503	28.902	0,93	0,76	0,62	0,57	0,50

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2011 s/d 2015

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Reaisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	13.200.000.000	13.220.000.000	13.340.000.000	13.360.000.000	13.380.000.000	652.688.000	1.318.202.500	2.081.245.000	2.429.174.100	2.285.584.360	0,05	0,10	0,16	0,18	0,17	0,34	42,66
2.	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	7.028.192.000	7.755.000.000	9.270.000.000	11.960.000.000	15.850.000.000	3.373.078.000	2.265.404.800	10.638.206.000	12.322.923.357	10.730.168.785	0,48	0,29	1,15	1,03	0,68	22,86	84,92
3.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	7.550.000.000	9.050.000.000	14.450.000.000	17.300.000.000	16.150.000.000	3.859.205.800	4.059.861.224	5.223.096.000	10.056.371.120	2.232.355.580	0,51	0,45	0,36	0,58	0,14	23,15	12,15
4.	Program Pengawasan SDKP, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	465.000.000	465.000.000	465.000.000	465.000.000	465.000.000	172.268.000	321.236.000	1.358.822.000	1.357.255.100	1.219.956.000	0,37	0,69	2,92	2,92	2,62	0,00	99,81
5.	Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	3.900.000.000	4.400.000.000	4.900.000.000	5.500.000.000	6.300.000.000	671.700.500	428.496.900	1.348.365.000	4.220.417.900	2.999.129.887	0,17	0,10	0,28	0,77	0,48	12,74	90,63

Dari penyajian Tabel 2.1 diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa selama 5 (lima) tahun tersebut pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui program dan kegiatan yang ada terus mengalami peningkatan, akan tetapi belum secara signifikan yang dapat dilihat dari rasio capaian tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor penghambat, baik dari internal maupun eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan secara menyeluruh, seperti masih terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia dan kelembagaan kelautan dan perikanan dalam pemanfaatan potensi yang ada, masih sulitnya mengakses sumber permodalan bagi nelayan/pembudidaya ikan, masih rendahnya minat investor di sektor kelautan dan perikanan, masih tingginya biaya produksi ikan akibat mahalnya harga pakan, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar petani, masih terbatasnya dukungan lintas sektor.

Sedangkan pada Tabel 2.2 diatas diketahui bahwa dukungan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terus mengalami kenaikan, akan tetapi juga belum secara signifikan. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pelayanan, dikarenakan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama 5 (lima) tahun tidak terealisasi secara menyeluruh.

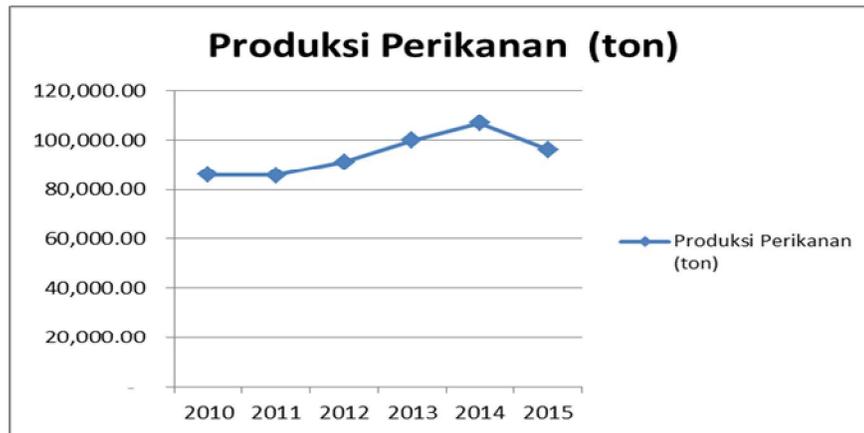
### **2.3.1 Perkembangan Produksi Perikanan**

Selama kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan 2015, perkembangan produksi perikanan di Provinsi Jambi yang berasal dari produksi perikanan tangkap dan budidaya. Produksi perikanan tangkap berasal dari penangkapan ikan di laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari kegiatan budidaya ikan di kolam, KJA, tambak dan minapadi, perkembangan produksi perikanan terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. Perkembangan Produksi Perikanan tahun 2010 – 2015

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Produksi Perikanan (ton)	85,881.50	85,747.70	91,178.50	99,913.50	106,881.90	96,489.8	2.53

Grafik 1. Perkembangan Produksi Perikanan tahun 2010 – 2015



Dari tabel dan grafik diatas terlihat produksi perikanan pada tahun 2010 sebesar 85.881,50 ton pertahun, angka ini terus meningkat hingga tahun 2014 menjadi 106,881.90 ton namun di tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 96,489.8. secara keseluruhan produksi perikanan meningkat sebesar 2,53% pertahun. Peningkatan ini sangat signifikan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan pada kurun waktu 2010 hingga 2015. Peningkatan produksi perikanan ini berasal dari hasil produksi penangkapan dilaut dan perairan umum. Peningkatan produksi ini didukung oleh program pengembangan perikanan tangkap yang salah satu diantaranya telah beroperasinya armada penangkapan ikan kapasitas 30 GT sehingga wilayah operasi penangkapannya lebih luas serta adanya bantuan alat penangkapan ikan bagi nelayan. Disamping

itu adanya restocking (pemacuan stock) ikan diperairan umum. Sedangkan produksi budidaya dihasilkan dari usaha budidaya kolam, keramba, KJA, tambak dan minapadi. Turunnya produksi perikanan di tahun 2015 ini sebagai dampak kemarau panjang yang melanda Provinsi Jambi, sehingga banyak lahan/kolam masyarakat yang kering dan menurunnya kualitas air. Disamping itu pada aktifitas penangkapan ikan terganggu akibat kabut asap yang pekat, sehingga mengganggu jarak pandang nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut dan perairan umum.

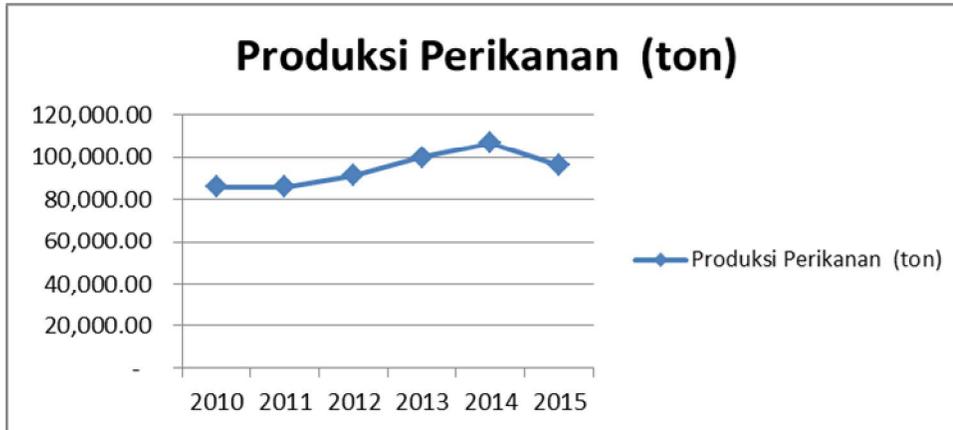
### 2.3.2 Produksi Benih Ikan

Benih ikan yang diperoleh para pembudidaya ikan di Provinsi Jambi berasal dari Balai Benih Ikan Sentral Kerinci, BBID, Balai Benih Ikan Lokal yang ada di tiap kab/kota, Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan BBAT Jambi. Produksi benih di Provinsi Jambi selama tahun 2010-2015 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Perkembangan Jumlah produksi benih tahun 2010 – 2015

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Produksi Benih (ekor)	127,695,115	175,775,315	120,288,991	148,078,300	181,115,757	161,908,800	8.18

Grafik 2. Perkembangan Jumlah produksi benih tahun 2010 – 2015.



Pada tabel dan grafik terlihat produksi benih ikan provinsi Jambi pada tahun 2010 sebesar 127.695.115 ekor dan meningkat ditahun 2011 menjadi 175.775.315 pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 120.288.991 ekor dan produksi benih kembali meningkat hingga tahun 2014 menjadi 181.115.757 ekor. Di tahun 2015 produksi benih kembali turun menjadi 161.908.800 ekor, meskipun demikian secara keseluruhan produksi benih ikan meningkat sebesar 8,18% pertahun. Naik turunnya produksi benih ikan ini sejalan dengan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Benih ikan yang disebarakan kepada petani ikan di Provinsi Jambi berasal dari Balai Benih Ikan Sentral Kerinci, Balai Benih Ikan Lokal yang ada di tiap kab/kota, Usaha Pembenihan Rakyat (UPR), Taman Anggrek, Balai Benih Ikan Thehok dan Balai Budidaya Air Tawar Jambi. Namun sifat produk perikanan ini sangat bergantung terhadap iklim dan cuaca. Dalam kurun waktu terakhir, Provinsi Jambi dilanda kemarau panjang dan kekeringan yang mengakibatkan menurunnya kualitas air sehingga mempengaruhi produksi benih ikan.

### **2.3.3 Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran**

Untuk meningkatkan pemasaran produk perikanan agar margin keuntungan dan nilai tambah yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan makin meningkat maka pembinaan mutu produk dan pengolahan hasil perikanan di Provinsi Jambi semakin ditingkatkan baik terhadap komoditas ekspor maupun yang dikonsumsi di dalam negeri.

Pembinaan mutu terhadap produk perikanan yang akan diekspor, khususnya dalam rangka memenuhi peraturan bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya, mengingat Provinsi Jambi sudah mempunyai laboratorium khusus yakni Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPMHP), juga untuk pemasaran lokal dan domestik, pemeriksaan dilaksanakan di laboratorium oleh petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Pemasaran hasil perikanan merupakan bentuk distribusi alami yang berbasis keseimbangan permintaan dan penawaran (supply and demand) ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal, antar pulau dan ekspor. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal pada saat-saat tertentu Provinsi Jambi masih mendatangkan ikan laut segar dan olahan/ikan asin dari daerah lain. Sementara dalam produksi budidaya dan ikan hias Provinsi Jambi mengirimkan ke luar Provinsi.

Produksi perikanan Jambi yang diekspor pada tahun 2010-2016 adalah ikan hasil tangkapan berupa jenis ikan hias. Ekspor ikan hias ini meliputi ekspor keluar negeri dan domestik.

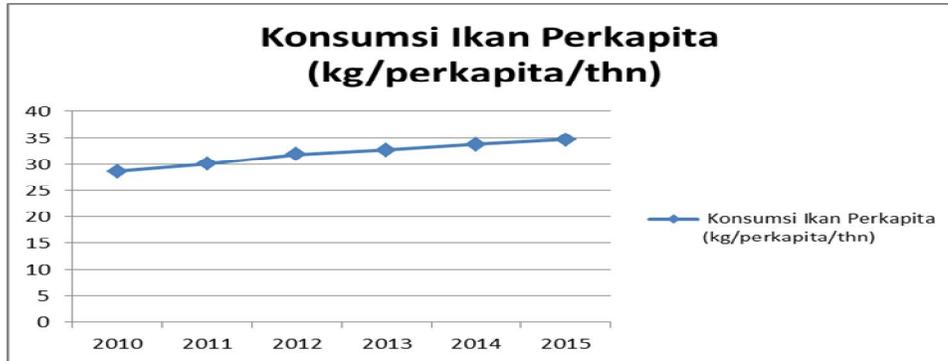
### 2.3.4 Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi

Tingkat ketersediaan ikan untuk konsumsi penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2010 sekitar 23,4 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 34.7 kg/kapita/tahun, berarti mengalami peningkatan sebesar 3.88%. Perkembangan ketersediaan ikan untuk konsumsi perkapita per tahun di Provinsi Jambi selama tahun 2010-2015 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan konsumsi ikan perkapita (kg/kap/thn) tahun 2010 – 2015

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Konsumsi Ikan Perkapita (kg/perkapita/thn)	28.7	30.1	31.9	32.76	34.0	34.7	3.88

Grafik 3. Perkembangan konsumsi ikan perkapita (kg/kap/thn) tahun 2010 – 2015



Dari tabel dan grafik terlihat pada tahun 2010 menunjukkan angka 28,7 kg/kapita/tahun, hingga tahun 2015 angka konsumsi ikan perkapita masyarakat provinsi Jambi mencapai 34,70 kg/perkapita/tahun atau terjadi peningkatan sebesar 3,88%. Upaya meningkatkan angka konsumsi ikan ini dilakukan melalui Program Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan dan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan bermacam kegiatan

diantaranya pameran produk perikanan, Kampanye GEMARIKAN, Lomba masak serba ikan, Demonstrasi pengolahan (diversifikasi) produk yang berbahan dasar ikan, penyebaran leaflet, Poster GEMARIKAN dan lain sebagainya.

Untuk memacu peningkatan konsumsi ikan masyarakat Jambi telah terbentuk suatu Forum yang bernama Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Jambi, Forum ini secara signifikan membantu melaksanakan kegiatan Kampanye Gemarikan di Provinsi Jambi. Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota dan bekerjasama dengan FORIKAN dan PKK.

Di Provinsi Jambi lokasi kegiatan sentra pengolahan di Kab. Tanjung Jabung Barat yang terletak di kawasan PPP Kuala Tungkal. Kegiatan usaha pengolahan di sentra Pengolahan terdiri dari 3 komoditi yaitu : Produk terasi, kerupuk dan ikan kering/ikan asin.

Untuk memacu perkembangan kegiatan pengolahan di Sentra pengolahan hasil perikanan berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi berupa Pembangunan sarana dan prasarana, bantuan peralatan dan bimbingan teknis. Sampai dengan tahun 2015 telah dibangun gedung pengolahan beserta lantai jemur yaitu Gedung pengolahan terasi yang dikelola oleh UPI Sumber Laut Bersama, gedung pengolahan kerupuk (dipakai untuk kegiatan pengolahan terasi) yang dikelola oleh UPI Berkah, gedung pengolahan ikan asin kering dikelola oleh UPI Rezeki Laut Bersama, gedung kerupuk (melalui TP Kabupaten) dikelola oleh UPI Juwita dan Fillet Patin.

Sentra pengolahan tersebut telah dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana pengolahan, jaringan listrik, air bersih dan pembangunan IPAL

(Instalasi Pengolahan Air Limbah).

### **2.3.5 Pembinaan Usaha Perikanan Tangkap di PPP**

Dalam upaya membina pengembangan usaha nelayan laut dalam berproduksi dan pemasaran hasil perikanan laut, telah dikembangkan berbagai sarana penunjang dalam kawasan Pusat Pendaratan Ikan yang dipusatkan di dua pelabuhan yaitu PPP Kuala Tungkal dan PPI Nipah Panjang. PPI Kuala Tungkal hingga awal tahun 2010 ditetapkan sebagai UPTD dan mulai operasional dengan kegiatan penyediaan es balok, bongkar muat ikan, pelayanan docking dan lainnya.

### **2.3.6 Pembinaan Usaha Budidaya/Pembenihan di BBI**

Balai benih ikan di Provinsi Jambi terdiri atas BBI Lokal terdapat di seluruh Kabupaten /Kota, yakni BBI Tanah Tumbuh (Kab. Bungo), BBI Muara Limun (Kab. Sarolangun), BBI Simpang Rimbo (Kota Jambi), dan BBI Tempino (Kab. Ma. Jambi), BBI Talang Kawo (Kab. Merangin), BBI Pembengis (Kab. Tanjung Jabung Barat), BBI Dendang (Kab. Tanjung Jabung Timur), BBI Lokal Talang Kemulun (Kab. Kerinci), BBI Sungai Alai (Kab. Tebo) dan BBI Karneo (Kab. Batanghari).

Tugas dan fungsi BBI diantaranya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pembudidaya ikan dalam upaya pengembangan produksi benih ikan, cara yang ditempuh antara lain dengan memberikan bantuan induk serta memberi petunjuk teknis.

### **2.3.7 Kelembagaan Usaha Perikanan**

Perkembangan kelembagaan usaha perikanan seperti koperasi yang bergerak dalam bidang perikanan cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dari awal berdirinya koperasi perikanan sampai sekarang sudah terlihat peningkatan usaha dan jumlah anggotanya.

Sampai dengan tahun 2015 jumlah koperasi perikanan tercatat 63 buah, koperasi tersebut berlokasi di Kab. Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi dan Kab. Batanghari, sebagian besar koperasi perikanan bergerak dalam bidang perikanan laut yaitu usaha penangkapan ikan dan budidaya tambak, sebagian kecil bidang usaha pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan.

Pada tahun 2013 telah dibentuk kelembagaan usaha perikanan diantaranya :

1. Asosiasi pembudidaya patin jambi (AP2J)
2. Asosiasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan Jambi (AP4J)
3. Asosiasi pengusaha dan pembudidaya ikan hias (APPIH)

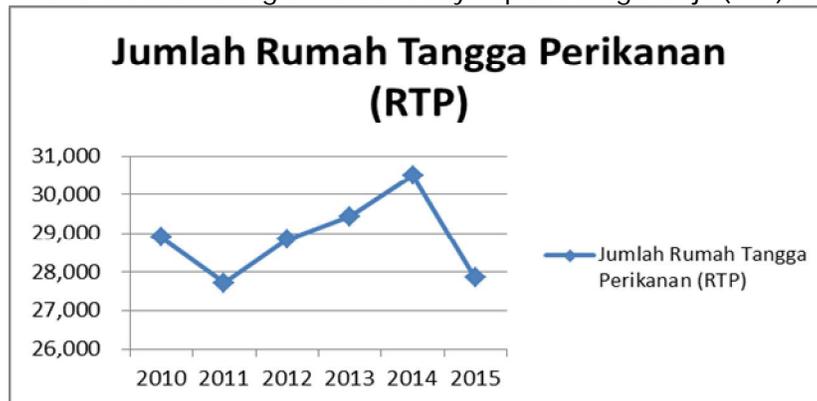
### **2.3.8 Penyerapan Tenaga Kerja**

Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja sub Sektor Perikanan pada Tahun 2010 hingga Tahun 2015 mengalami penurunan hampir disemua jenis kegiatan. Hal ini tampak sebagai pengaruh krisis global yang mempengaruhi operasional baik di perikanan tangkap maupun budidaya, serta dampak kemarau panjang dan kabut asap sehingga nelayan tidak melaut dan pembudidaya ikan tidak dapat melakukan aktifitas usaha karena dampak kemarau panjang dan kekeringan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (RTP) tahun 2010 – 2015

Indikator	Capaian						Perkem- bangan (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	28,898	27,719	28,845	29,436	30,503	27,857	-0.60

Grafik 4. Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (RTP) Tahun 2010 – 2015



### 2.3.9 Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup

#### 2.3.9.1. Restocking/Penebaran Benih Ikan

Kegiatan penebaran kembali benih ikan lokal (*Restocking*) di perairan umum dimaksudkan untuk merehabilitasi sumberdaya perikanan yang kritis dan memulihkan populasi ikan/stock ikan pada perairan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan restocking adalah meningkatkan stock populasi ikan di perairan umum dan membantu pengendalian dan keseimbangan ekosistem perairan umum serta meningkatkan produksi ikan di perairan untuk meningkatkan pendapatan dan ketersediaan gizi murah.

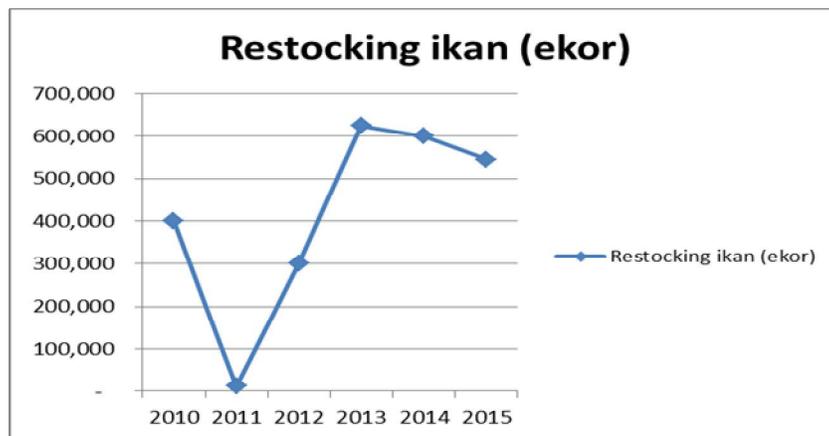
Restocking dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penebaran ikan di perairan umum. Selama tahun 2010 hingga 2015 telah dilaksanakan restocking

ikan di beberapa lokasi yaitu :

Tabel 6. Perkembangan Jumlah Restocking ikan tahun 2010 - 2015

Indikator	Capaian						Perkem- bangan (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Restocking ikan (ekor)	400,000	11,000	300,000	625,000	600,000	545,000	525.04

Grafik 5. Perkembangan Jumlah Restocking ikan tahun 2010 – 2015



Dari Tabel dan grafik terlihat jumlah restocking ikan diperairan umum pada tahun 2010 sebesar 400.000 ekor benih ikan, pada tahun 2011 jumlah restocking ikan ini menurun menjadi 11.000 ekor dan pada tahun 2012 kembali meningkat sebanyak 300.000 ekor, pada tahun 2014 restocking ikan sebanyak 600.000 ekor dan pada tahun 2015 sebanyak 545.000 ekor. Jika dijumlahkan total restocking ikan dari tahun 2010 hingga tahun 2015 jumlah restocking ikan sebanyak 2.481.000 ekor. Jumlah restocking ikan ini berfluktuasi, hal ini sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dalam tahun anggaran berjalan. Lokasi restocking ini tersebar di semua suaka dan lubuk larangan yang ada di Provinsi Jambi.

### 2.3.9.2. Pengembangan Suaka Perikanan (Lubuk Larangan)

Dalam upaya pelestarian sumberdaya perikanan, selain kegiatan restocking juga dilakukan pengembangan suaka perikanan. Penetapan suaka perikanan merupakan keharusan dalam rangka pelestarian sumberdaya ikan di Perairan umum Provinsi Jambi di mana perairannya mendekati kritis. Pembangunan suaka diperlukan dalam upaya menjamin kelangsungan hidup ikan yang berpengaruh terhadap peningkatan Produksi Perairan. Suaka dibangun/ditetapkan pada zona inti maupun zona penyangga, guna melindungi induk ikan yang akan memijah serta perlindungan terhadap larva dari kelangsungan hidupnya. Perkembangan jumlah suaka perikanan tahun 2010 hingga 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Suaka Perikanan tahun 2010 - 2015

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Suaka Perikanan (lokasi)	22	20	20	21	20	20	-1.77

Grafik 6. Perkembangan Jumlah Suaka Perikanan tahun 2010 - 2015



Dari tabel dan grafik terlihat jumlah suaka perikanan/reservat di Provinsi Jambi pada tahun 2010 sebanyak 22 suaka, dan pada tahun 2015 jumlah suaka perikanan sebanyak 20 suaka atau menurun sebesar 1,77% pertahun. Hal ini dikarenakan terjadinya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mencemari perairan, sehingga sangat mengganggu keberlangsungan sumberdaya ikan di daerah suaka/reservat perikanan. Penetapan suaka/Reservat ikan merupakan keharusan dalam rangka pelestarian sumber daya alam di Perairan Provinsi Jambi di mana perairannya sudah mendekati kritis. Disamping itu pembangunan reservat juga diperlukan dalam upaya menjamin kelangsungan hidup ikan, juga berpengaruh terhadap peningkatan Produksi suatu Perairan. Reservat dapat dibangun/didirikan pada wilayah pemijahan ikan (zona inti) maupun wilayah anaknya (zona penyangga), untuk dapat melindungi induk ikan yang akan memijah serta anak-anak ikan dari kelangsungan hidupnya.

#### **2.3.9.3. Pengawasan Sumberdaya Perikanan**

Pengawasan sumberdaya perikanan di Provinsi Jambi mengacu kepada Undang-undang No. 31 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selama tahun 2006-2010 masih terdapat pelanggaran-pelanggaran antara lain :

1. Masih adanya nelayan dalam mengoperasikan kapalnya tidak dilengkapi dengan SIUP dan SIPI (Dokumen Kapal)
2. Masih adanya kapal nelayan berukuran > 5 GT yang melanggar jalur penangkapan ikan (beroperasi di jalur I).
3. Masih adanya nelayan/masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, listrik, tuba dan lain-lain di Perairan Umum

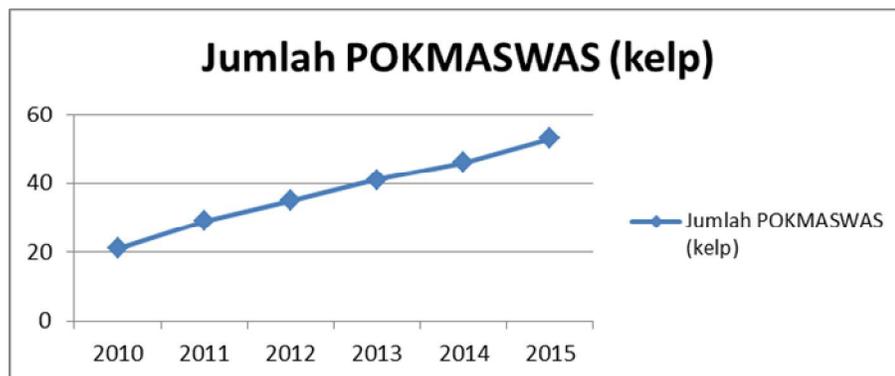
Jambi.

Dalam meningkatkan pengawasan di masyarakat perikanan, dibentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan berkembang hingga saat ini. Perkembangan jumlah POKMASWAS tahun 2010 – 2015 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Jumlah POKMASWAS Tahun 2010 – 2015

Indikator	Capaian						Perkem- bangan (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah POKMASWAS (kelp)	21	29	35	41	46	53	20.67

Grafik 7. Jumlah POKMASWAS tahun 2010- 2015



Dari tabel dan grafik terlihat jumlah kelompok masyarakat pengawas perikanan pada tahun 2010 sebanyak 21 kelompok, hingga tahun 2015 bertambah menjadi 53 kelompok atau meningkat sebesar 20,67% pertahun. POKMASWAS ini merupakan kelompok masyarakat yang mengawasi kelestarian SDA khususnya sumber daya ikan di perairan umum dan laut agar terhindar dari pengrusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga SDI akan terus terjaga dan lestari.

### **2.3.10 Laboratorium Kesling**

Sehubungan dengan upaya menekan permasalahan akibat penyakit dan kualitas lingkungan, Provinsi Jambi yang memiliki wilayah pengembangan budidaya KJA di sepanjang aliran sungai dihadapkan pada masalah tersendiri yang harus dikendalikan yaitu terutama kemungkinan adanya pencemaran dari kegiatan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI), limbah pabrik, limbah perkebunan maupun limbah lainnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah melakukan pemantauan, pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang ditunjang dengan sarana Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang mampu berfungsi sebagai unit diagnosa secara optimal sehingga dapat memberikan pelayanan dan rekomendasi dini terhadap kemungkinan munculnya suatu penyakit dan pencemaran serta strategi penanggulangannya yang aman bagi pangan.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok SKPD telah difungsikan fasilitas-fasilitas yang dimiliki melalui kelembagaan UPTD, yaitu :

### **2.3.12 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal**

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berlokasi di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Fungsi dan peranan PPP kuala Tungkal menunjang peningkatan produksi perikanan, perbaikan kapal dan pengembangan pemasaran hasil perikanan laut maupun hasil olahan.

Dalam upaya membina pengembangan usaha nelayan laut dalam berproduksi dan pemasaran hasil perikanan laut, telah dikembangkan berbagai sarana penunjang dalam kawasan Pelabuhan Perikanan. Di Provinsi Jambi terdapat 3 (tiga) Pelabuhan Perikanan yaitu PPP Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjab Barat serta PPI Nipah Panjang dan PPI Teluk Majelis Kabupaten Tanjab

Timur. PPP Kuala Tungkal mulai dibangun kembali tahun 1997 melalui dana APBN murni dan bantuan luar negeri, DAK dan APBD. PPI Nipah Panjang mulai dibangun tahun 2003 dan masih tahap penyelesaian sedangkan PPP Kuala Tungkal tahun 2011 sudah mulai dapat memberikan pelayanan.

Sepanjang tahun 2015, PPP Kuala Tungkal telah mengeluarkan sebanyak 141 buah surat persetujuan berlayar (SPB), terdapat 4.800 kali kunjungan kapal, 72.000 ekor produksi udang ketak, 360 ton ikan, 36 ton terasi, 36 ton ikan kering serta 48.000 es balok.

*a. Kondisi Fisik*

Kondisi tahun 2010 kondisi fisik PPP Kuala Tungkal sudah bisa beroperasi, sekalipun prasarana jalan menuju lokasi PPI Kuala Tungkal belum sempurna. Keadaan Sarana fisik PPP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Keadaan sarana fisik PPP di Kuala Tungkal

Sarana yang ada	Keadaan Sarana			
	Baik	Berfungsi	Baik tak Berfungsi	Rusak berat tak Berfungsi
Dermaga	V	v	-	-
Trestel	V	v	-	-
Tempat Pelelangan	V	v	-	-
Gedung serba guna	V	v	-	-
Tp. penjemuran ikan	V	v	-	-
Ruang prtemuan	V	v	-	-
Kios nelayan	V	v	-	-
Gedung Wasdi	V	v	-	-
Mushola	V	v	-	-
Bengkel	V	v	-	-
Mes Karyawan	V	v	-	-
Toilet	V	v	-	-
Gudang Air Bersih	V	v	-	-
Pabrik Es	V	v	-	-
Pos penjagaan	V	v	-	-
Doking Kapal/Slipway	V	v	-	-
Kantor	V	v	-	-
Genset	V	v	-	-
Sumur Bor	V	v	-	-

*b. Fungsi dan operasional PPP Kuala Tungkal dapat diuraikan sebagai berikut :*

1. Pabrik es

Pabrik es dengan kapasitas 15.000 kg es balok per hari, telah berproduksi maksimal dengan harga es lebih murah, dengan sasaran membantu masyarakat nelayan dalam usahanya.

2. Sumur Bor

Sumur ini mampu menghasilkan air bersih dalam jumlah besar untuk di manfaatkan oleh nelayan.

3. Fasilitas Labuh Sandar Kapal

Fasilitas ini sudah dapat dimanfaatkan dalam bongkar ikan hasil tangkapan nelayan.

4. Aula pertemuan

Fasilitas dengan kapasitas sekitar 80 orang ini telah berfungsi sebagai tempat pertemuan nelayan, wanita nelayan dan pelatihan.

5. SPDN

Fasilitas ini sudah mampu mendistribusikan BBM dengan harga wajar langsung kepada nelayan

6. Lantai Jemur

Fasilitas ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan untuk menjemur ikan olahan hasil tangkapan, khususnya udang popay dengan kapasitas sekitar 300 – 1.000 kg/hari

7. Waserda

Sudah berfungsi dalam memberikan pelayanan pengadaan bahan-bahan untuk melaut.

8. Sasaran Prasarana PSDKP digunakan secara insidental

9. Doking Kapal/Slipway

Secara rutin sudah dapat melayani kapal nelayan yang ingin memperbaiki kapalnya.

#### 10. Sebagai sumber PAD Provinsi Jambi

UPTD PPP mempunyai daerah kerja di pangkalan-pangkalan pendaratan ikan (PPI) dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun Struktur Organisasi UPTD – PPP ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi No. 32 Tahun 2009 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal.

#### **2.3.12 Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)**

Dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan kualitas usaha kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi, UPTD PMHP memegang peran penting terutama di dalam penerapan mutu, pengujian dan penerbitan hasil uji mutu produk hasil perikanan.

Peranan dan fungsi UPTD PMHP antara lain adalah :

- Pelaksanaan kebijakan pelayanan mutu dan keamanan produk hasil perikanan
- Pelaksanaan kebijakan verifikasi persyaratan teknis Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar ekspor produk hasil perikanan
- Pelaksanaan kebijakan pengujian mutu produk hasil perikanan
- Pelaksanaan kebijakan hasil pengujian mutu produk hasil perikanan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2015 terdapat hambatan dan permasalahan yang secara langsung

tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan namun secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian kinerja. Hambatan dan kendala tersebut antara lain :

1. Tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih rendah.
2. Tingginya sifat ketergantungan produk perikanan terhadap cuaca, seperti bencana asap dan musim kemarau panjang yang mengakibatkan keringnya kolam masyarakat sehingga tidak dapat melakukan aktifitas pembudidayaan ikan, serta jarak pandang yang mengganggu nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut dan perairan umum.
3. Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80% sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT.
4. Keterampilan pembudidaya dan nelayan belum memadai sehingga produktifitas usaha masih rendah.
5. Belum adanya formasi jabatan fungsional di sektor perikanan untuk Balai Benih Ikan, baik di BBIS maupun BBI lokal.
6. Sebagian pembudidaya ikan dan nelayan kurang disiplin dalam menerapkan teknologi anjuran dan belum melaksanakan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dengan benar sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan hasil usaha belum maksimal.
7. Tingginya biaya produksi ikan akibat mahalnya harga pakan yang didatangkan dari luar daerah, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar petani.

8. Belum adanya Asosiasi yang dapat memfasilitasi perdagangan langsung untuk negara tujuan ekspor (ekspor ikan hias dan udang hidup masih melalui Jakarta)
9. Masih terbatasnya dukungan lintas sektor untuk jalan produksi, saluran irigasi, energi listrik (PLN) di kawasan unit pengolahan ikan.
10. Masih adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) dan industri tidak bertanggung jawab yang dapat merusak lingkungan perairan, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan produksi sumberdaya ikan.
11. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan dibidang Perikanan, sehingga masih ditemukan pelanggaran dibidang penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumberdaya ikan.

Berdasarkan uraian diatas, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah adalah antara lain :

1. Meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, khususnya dengan mengembangkan potensi masyarakat melalui Pokmaswas.
2. Mengembangkan pola usaha budidaya dengan pendekatan kawasan, sehingga mudah dalam pembinaan maupun penyiapan sarana pendukungnya.
3. Melakukan rekrutmen tenaga teknis/sarjana kelautan dan perikanan, khususnya untuk tenaga di lapangan serta untuk tenaga pendamping paket yang diberikan langsung kepada nelayan atau pembudidaya ikan.
4. Melaksanakan sosialisasi Cara Budidaya Ikan (CBIB) yang baik dan benar.

5. Mengembangkan pola pelatihan dan magang yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap melalui pembiayaan dana APBD, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP).
7. Menempuh upaya fasilitasi akses sumber modal bagi nelayan/pembudidaya ikan melalui KKMB dan program lainnya.

### III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan terdapat hambatan dan permasalahan yang secara langsung langsung dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pencapaian kinerja, permasalahan tersebut antara lain :

1. Tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih rendah.
2. Tingginya sifat ketergantungan produk perikanan terhadap cuaca, seperti bencana asap dan musim kemarau panjang yang mengakibatkan keringnya kolam masyarakat sehingga tidak dapat melakukan aktifitas pembudidayaan ikan, serta jarak pandang yang mengganggu nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut dan perairan umum.
3. Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80% sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT.
4. Keterampilan pembudidaya dan nelayan belum memadai sehingga produktifitas usaha masih rendah.
5. Belum adanya formasi jabatan fungsional di sektor perikanan untuk Balai Benih Ikan, baik di BBIS maupun BBI lokal.
6. Sebagian pembudidaya ikan dan nelayan kurang disiplin dalam menerapkan teknologi anjuran dan belum melaksanakan cara

budidaya ikan yang baik (CBIB) dengan benar sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan hasil usaha belum maksimal.

7. Tingginya biaya produksi ikan akibat mahalnya harga pakan yang didatangkan dari luar daerah, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar petani.
8. Belum adanya Asosiasi yang dapat memfasilitasi perdagangan langsung untuk negara tujuan ekspor (ekspor ikan hias dan udang hidup masih melalui Jakarta).
9. Masih terbatasnya dukungan lintas sektor untuk jalan produksi, saluran irigasi, energi listrik (PLN) di kawasan unit pengolahan ikan.
10. Masih adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) dan industri tidak bertanggung jawab yang dapat merusak lingkungan perairan, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan produksi sumberdaya ikan.
11. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan dibidang Perikanan, sehingga masih ditemukan pelanggaran dibidang penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumberdaya ikan.
12. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan.
13. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki tertinggal jauh dengan nelayan asing yang masuk ke perairan Jambi.

14. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga pembudidaya ikan belum mencapai skala usaha.
15. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarinya.
16. Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, karena belum tersedianya *coldstorage* untuk penyimpanan dan angkutan perikanan tersebut ke daerah pemasaran.
17. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, *cold storage*, jenis alat tangkap.
18. Merebaknya pencurian ikan dan terjadinya *over fishing*, serta pola penangkapan yang merusak ekosistem pesisir dan laut.
19. Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
20. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpecah, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.
21. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021, yaitu :

**“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera”**

**JAMBI TUNTAS 2021**

**Tertib:** Diartikan sebagai wujud tata kelola Pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.

**Unggul:** Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal

sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.

**Nyaman:** Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

**Tangguh:** Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan

**Adil:** Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

**Sejahtera:** mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 –2021, sebagai berikut:

**1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih,**

**transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.

**2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.

**3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

**4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu meningkatkan nilai tambah produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.

**5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk

pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah.

**6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
5. Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis
6. Meningkatkan kualitas SDM perempuan
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
8. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
9. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
10. Stabilitas makro ekonomi yang terjaga untuk mencapai perubahan struktur ekonomi yang kuat dan seimbang

11. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
12. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
13. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
14. Memperkuat pembangunan desa dan kawasan perdesaan
15. Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
16. Menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi ekonomi daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Provinsi Jambi menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan Tahun 2016 - 2021 berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam bentuk :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
2. Reformasi kelembagaan birokrasi di berbagai tingkatan yang mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah
5. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
6. Meningkatnya peran agama dalam kehidupan masyarakat
7. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum

9. Meningkatnya keamanan pantai timur Jambi
10. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)
11. Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
12. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian
13. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan IPTEK
14. Meningkatnya realisasi investasi
15. Peningkatan peran koperasi dan UMKM
16. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
17. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik
18. Meningkatnya akses terhadap air bersih, pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi dan infrastruktur pengendalian daya rusak air
19. Meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan
20. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat
21. Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan hutan
22. Menurunnya kebakaran hutan dan lahan
23. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
24. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
25. Meningkatnya kualitas keterampilan tenaga kerja
26. Menurunnya desa tertinggal di Provinsi Jambi

27. Meningkatnya desa mandiri di Provinsi Jambi
28. Meningkatnya peran serta masyarakat desa dalam penanganan bencana
29. Meningkatnya kualitas hidup fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan komunitas adat terpencil (KAT)
30. Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. yang salah satu misinya menyatakan: **Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.** Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh KKP diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut :

#### **A. Visi**

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Berdaulat, Mandiri dan Berkelanjutan untuk Kemakmuran Rakyat”**.

#### **B. Misi**

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan

perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
8. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

### C. Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

#### **Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :**

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

#### **Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :**

- 1 Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
- 2 Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
- 3 Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

#### **Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :**

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat

2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

**D. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni **“Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan dan Kesejahteraan”** menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective*, sebagai berikut:

**1. Stakeholders Prespective**

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan”, dengan Indikator Kinerja:

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan.

**2. Customer Perspective**

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua yang akan dicapai adalah “Terwujud pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan”, dengan Indikator Kinerja.

- a. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

- b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri.

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan” merupakan sasaran strategis ketiga yang akan dicapai adalah pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
- b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan
- c. Produksi perikanan
- d. Produksi garam rakyat
- e. Nilai ekspor hasil perikanan
- f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn dan
- g. Persentase peningkatan PNBPN dari sektor Kelautan dan Perikanan

### **3. Internal Process Perspective**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni:

- a. Sasaran strategis keempat yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan “
- b. Sasaran strategis kelima yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.
- c. Sasaran strategis keenam yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”

#### **4. Learning and Growth Perspective (input)**

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

- a. Sasaran strategis ketujuh yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas.
- b. Sasaran strategis kedelapan yakni “Tersedianya Pengetahuan yang Handal dan Mudah Diakses”
- c. Sasaran strategis kesembilan yakni “Terwujudnya KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP.
- d. Sasaran strategis kesepuluh yakni “Terkelolanya Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satunya melimpahkan kewenangan wilayah perairan laut dari 0-12 mil yang sebelumnya dikelola oleh Kabupaten/Kota (0-4 mil) kini dikelola oleh Provinsi secara menyeluruh. Oleh sebab itu sangat diperlukan pengawasan yang ketat dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada demi kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mengutamakan kelestarian lingkungan dengan melakukan penangkapan di area penangkapan, menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, membudidayakan ikan secara baik dan benar serta mengolah produk perikanan yang berkualitas baik.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui program

dan kegiatan yang ada terus berusaha membantu nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah produk perikanan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada serta melakukan pengawasan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir kegiatan kelautan dan perikanan demi kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta demi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah produk perikanan.

### **3.5. Isu – Isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Provinsi Jambi dimasa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu antara lain :

1. Tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih rendah.
2. Tingginya sifat ketergantungan produk perikanan terhadap cuaca, seperti bencana asap dan musim kemarau panjang yang mengakibatkan keringnya kolam masyarakat sehingga tidak dapat melakukan aktifitas pembudidayaan ikan, serta jarak pandang yang mengganggu nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut dan perairan umum.
3. Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80% sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT.
4. Keterampilan pembudidaya dan nelayan belum memadai sehingga produktifitas usaha masih rendah.
5. Belum adanya formasi jabatan fungsional di sektor perikanan untuk Balai Benih Ikan, baik di BBIS maupun BBI lokal.
6. Sebagian pembudidaya ikan dan nelayan kurang disiplin dalam menerapkan teknologi anjuran dan belum melaksanakan cara budidaya ikan yang baik

(CBIB) dengan benar sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan hasil usaha belum maksimal.

7. Tingginya biaya produksi ikan akibat mahalnya harga pakan yang didatangkan dari luar daerah, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar petani.
8. Belum adanya Asosiasi yang dapat memfasilitasi perdagangan langsung untuk negara tujuan ekspor (ekspor ikan hias dan udang hidup masih melalui Jakarta).
9. Masih terbatasnya dukungan lintas sektor untuk jalan produksi, saluran irigasi, energi listrik (PLN) di kawasan unit pengolahan ikan.
10. Masih adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) dan industri tidak bertanggung jawab yang dapat merusak lingkungan perairan, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan produksi sumberdaya ikan.
11. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan dibidang Perikanan, sehingga masih ditemukan pelanggaran dibidang penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumberdaya ikan.
12. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan.
13. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki tertinggal jauh dengan nelayan asing yang masuk ke perairan Jambi.

14. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga pembudidaya ikan belum mencapai skala usaha.
15. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarinya.
16. Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, karena belum tersedianya *coldstorage* untuk penyimpanan dan angkutan perikanan tersebut ke daerah pemasaran.
17. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, *cold storage*, jenis alat tangkap.
18. Merebaknya pencurian ikan dan terjadinya *over fishing*, serta pola penangkapan yang merusak ekosistem pesisir dan laut.
19. Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
20. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.
21. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.

## IV. TUJUAN DAN KEBIJAKAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menetapkan Rencana Tujuan dan Sasaran untuk Tahun 2016-2021 yang dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel. 10 Rencana Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pengelolaan dan pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kawasan yang lestari dan terlindungi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	5%	4%	4%	4%	4%
2	Meningkatkan Produksi Perikanan tangkap dan perikanan budidaya.	Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	6%	6%	6%	6%	6%
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	15%	7%	3,3%	3,3%	4%
3	Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Persentase peningkatan Konsumsi Ikan per Kapita	1%	2%	2,8%	2,7%	2,6%
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	88	91
		Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	-	-	62	64	66
		Meningkatnya opini laporan keuangan/persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	Opini laporan keuangan/persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	-	-	B	BB	A

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang akan diimplementasikan dalam tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
3. Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan.

#### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kawasan yang lestari terlindungi.
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya.
3. Meningkatnya produksi perikanan tangkap.
4. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita.
5. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.
6. Meningkatnya nilai SAKIP.
7. Meningkatnya Opini laporan keuangan/persentase penurunan temuan hasil perikanan

#### **4.2 Strategi dan Kebijakan**

Sasaran Strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam keterkaitannya dengan NAWACITA dan Jambi TUNTAS 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menetapkan Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil,

berdaya saing dan berkelanjutan di wilayah pesisir.

4. Meningkatkan tata kelola ruang laut.
5. Mendorong pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan.
6. Mengembangkan dan meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
7. Meningkatkan keberlanjutan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya.
8. Mendorong kemandirian masyarakat perikanan dan kelautan melalui pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
10. Meningkatkan SDM pelaku usaha perikanan dan akses permodalan.
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima.

Arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan Daerah dalam 5 Tahun ke depan dibagi menjadi 2 (dua) arah kebijakan, yaitu arah kebijakan pokok dan arah kebijakan lintas sektor :

Arah kebijakan pokok sektor kelautan dan perikanan untuk tahun 2016 - 2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan melalui pengawasan dan penegakan hukum.
2. Peningkatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan dan jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penggunaan inovasi dan teknologi serta pengujian produk hasil perikanan.

3. Pelaksanaan PERDA Zonasi WP3K.
4. Mendorong pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui penyediaan sarana prasarana dan teknologi untuk peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi).
5. Peningkatan peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
6. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan akses permodalan.

Sedangkan arah kebijakan lintas sektor adalah kebijakan yang juga melibatkan pihak-pihak terkait lainnya, antara lain :

1. Pengarusutamaan gender (Pemberdayaan wanita kelautan dan perikanan, UMKM dan Poklasar, Gemarikan).
2. Pembangunan kewilayahan (Minapolitan, Sentra produksi dan pengolahan, Wisata Bahari, Konservasi, Kampung Nelayan, SeHat Nelayan, PraSeHatkan).
3. Adaptasi perubahan iklim (Mitigasi/pencegahan bencana).
4. Tata kelola pemerintahan yang baik (Pengawasan terpadu).
5. Peningkatan Sumberdaya Aparatur, Nelayan dan Pembudidaya ikan (Pelatihan).

#### **4.2.1 Pengembangan Minapolitan**

Minapolitan merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pengembangan minapolitan bertujuan untuk (i) meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan

perikanan, (ii) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta (iii) mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Adapun sasaran pengembangan minapolitan adalah sebagai berikut (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi Daerah dan nasional.

Pendekatan pengembangan minapolitan melalui :

1. Ekonomi Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah

Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya, sekaligus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu sistem yang mapan.

2. Kawasan Ekonomi Unggulan

Memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria (i) bernilai ekonomis tinggi, (ii) teknologi tersedia, (iii) permintaan pasar besar, dan (iv) dapat dikembangkan secara massal.

3. Sentra Produksi

Minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya dan telah menerapkan teknologi inovatif dengan kawasan dan mutu terjamin.

#### 4. Unit Usaha

Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.

#### 5. Penyuluhan

Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan minapolitan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.

#### 6. Lintas Sektor

Minapolitan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasara produk perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses jalan, dan BBM.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengembangkan Minapolitan antara lain:

1. Pembangunan sarana dan prasarana perikanan seperti (i) pengembangan pelabuhan perikanan dengan prioritas di Kuala Tungkal dan Nipah Panjang, (ii) pengembangan kapal dan alat penangkapan ikan sebesar 5.100 unit, (iii) pengembangan kawasan budidaya di 18 kawasan, (iv) memenuhi seluruh kebutuhan benih ikan, (v) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (seperti; pengembangan sistem rantai dingin (cold chain system), sentra pengolahan, klaster/minapolitan industri hasil perikanan dan pasar ikan) di 11 Kab/Kota;

2. Pengembangan ekspor melalui pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi ekspor;
3. Mendorong peningkatan nilai investasi perikanan
4. Perluasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;
5. Pengembangan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan yang mampu menyalurkan dana pembiayaan melalui program KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank)
6. Pembangunan prasarana pulau-pulau kecil
7. Peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan meliputi:  
(i) usaha perikanan tangkap, (ii) usaha perikanan budidaya (iii) usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

#### **4.2.2 Entrepreneurship**

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (entrepreneurship) dilaksanakan melalui upaya membangun kepercayaan (trust building) bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa entrepreneurship para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi entrepreneurship akan memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya serta pemasar dan pengolah dalam memproduksi seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan lain-lainnya, serta pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi penjualan produk perikanan dengan harga yang pantas. Pengembangan kewirausahaan dilakukan

dalam rangka penciptaan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana yang masih menganggur. Kegiatan yang dilakukan adalah pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta pembuatan proposal. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan, BUMN, Swasta maupun dari pemerintah melalui dana APBN.

#### **4.2.3 Networking**

Setiap individu dan setiap wilayah punya potensi masing-masing yang sangat besar di samping juga masing-masing memiliki kekurangan atau kelemahan. Namun demikian setiap pelaku pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendiri-sendiri. Sampai saat ini masih ada pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan perikanan yang belum terhimpun dalam suatu bentuk jaringan kerja bahkan masih terlihat indikasi bahwa masing-masing masih mengutamakan identitas diri. Keadaan tersebut akan berpengaruh pada hasil kerja yang kurang optimal dalam pembangunan kelautan dan perikanan. DKP akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan perikanan dengan memfasilitasi pengembangan jejaring kerja. Melalui penciptaan dan penguatan networking, baik secara internal Provinsi-Kabupaten/Kota, antar instansi/lintas sektor, komunitas bisnis, kerjasama internasional (ekspor). Melalui pembentukan jejaring kerja akan terbina interaksi yang baik, secara langsung dan tidak langsung, antara berbagai pemangku kepentingan dan instansi pemerintah, sehingga terjalin suatu kesatuan yang lebih besar dan kuat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengeliminir kekurangan dan kelemahan yang dimiliki.

#### **4.2.4 Teknologi dan Inovasi**

DKP akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya jika dapat menguasai teknologi perikanan untuk sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya serta adaptasi perubahan iklim. Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menemukan teknologi-teknologi baru dalam rangka meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan secara lestari dan bertanggung jawab.

#### **4.2.5 Empowering**

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumberdaya lokal.

Pemberdayaan masyarakat ini dalam jangka panjang diarahkan untuk (i) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan masyarakat, (ii) peningkatan

kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (iii) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan komitmen KKP dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan antara lain pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, pengawasan sumberdaya ikan, pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini akan dilakukan (i) identifikasi dan kajian seluruh potensi dan permasalahan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada dalam rangka menyusun perencanaan pengelolaannya berbasis desa (ii) melibatkan secara aktif pemangku kepentingan terkait dengan upaya pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat, (iii) meningkatkan kapasitas aparatur sebagai pengelola di wilayahnya, (iv) memperbaiki kualitas masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan peningkatan kapasitas usaha, (v) memanfaatkan secara optimal kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dibentuk oleh berbagai program sebelumnya atau membentuk kelompok masyarakat baru, (vi) mengoptimalkan peran tenaga pendamping sebagai fasilitator sekaligus motivator dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan di tingkat desa serta melakukan sosialisasi, serta (vii) menerapkan upaya pemberdayaan secara konsisten dan berkelanjutan dengan pola bottom up sehingga jenis kegiatan yang dilaksanakan merupakan aspirasi kelompok masyarakat di wilayahnya.

#### **4.2.6 Penguatan Kelembagaan kelompok Masyarakat**

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan

ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi. Berbagai kelompok tercakup dalam Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan), KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan ikan, Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan Pokmas (Kelompok Masyarakat) pengelola terumbu karang. Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk akan terus diupayakan keberadaannya dan ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan. Pembentukan atau penguatan kelompok secara modern dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

## **V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi terutama di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai 9 Program dan 35 Kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Meubeleur
- Pengadaan Komputer
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Dengan kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penerimaan Calon Taruna STP
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Penatausahaan Kepegawaian
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penatausahaan Kearsipan

- Pendampingan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Koordinasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Statistik
- Rancangan Penyusunan Program, Anggaran dan Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD
- Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
- Inventarisasi dan Penertiban Aset

**6. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP), Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- Perlindungan dan konservasi/rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- Pengawasan terpadu kelautan dan perikanan
- Pengelolaan ruang laut
- Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- Pengembangan kawasan pesisir
- Pengelolaan instalasi pendung semurup kerinci
- Pengelolaan instalasi thehok

## 7. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan budidaya ikan di sentra produksi
- Pengembangan sumberdaya manusia perikanan budidaya
- Pengembangan Sarana dan prasarana perikanan budidaya
- Pengembangan perbenihan ikan komersil dan ikan lokal Jambi di UPTD BBID
- Pengembangan ikan hias di UPTD BBID
- Pengembangan induk dan benih UPTD BBIS Kerinci
- Pengembangan ikan semah
- Pengembangan budidaya air payau
- Pengembangan minapolitan
- Pengembangan dan pelatihan pemberdayaan wanita pembudidaya ikan dan pemuda kreatif
- Pengembangan dan pelatihan perikanan budidaya di pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, sekolah dan TNI/Polri
- Pemberdayaan pembudidaya di kawasan mandiri pangan
- Kesehatan ikan dan lingkungan
- Pengembangan kawasan perikanan budidaya
- Pengembangan dan penguatan modal usaha perikanan budidaya
- Pengembangan dan penguatan modal usaha perikanan budidaya
- Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya
- Pengembangan teknologi dan mutu pakan perikanan budidaya

## **8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan dan pengembangan aktifitas UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pengembangan sarana perikanan perikanan tangkap
- Pengelolaan usaha penangkapan ikan
- Pengelolaan sumberdaya ikan
- Pengembangan minapolitan tangkap
- Pengembangan kawasan perikanan tangkap
- Kesyahbandaran dan pengembangan pelabuhan perikanan
- Pengembangan pemberdayaan nelayan
- Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai kuala tungkal
- Kesyahbandaran pelabuhan perikanan pantai kuala tungkal
- Pengembangan dan pengelolaan instalasi PPI Nipah Panjang

## **9. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- Promosi dan publikasi kegiatan sektor perikanan
- Pengembangan sistem informasi pasar
- Pemasaran
- Pengembangan pemasaran hasil perikanan
- Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI)
- Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)

- Peningkatan mutu produk hasil kelautan dan perikanan
- Pengembangan usaha dan investasi pengolahan hasil perikanan
- Pengelolaan instalasi ikan hias taman anggrek
- Pengembangan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)
- Promosi dan publikasi kelautan dan perikanan
- Pelayanan dan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan di UPTD  
PMHP
- Pengelolaan instalasi ikan hias telanaipura
- Penerapan mutu hasil perikanan di UPTD PMHP
- Pembinaan mutu
- Pengembangan produk kelautan dan perikanan

## VI. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja utama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Tahun 2016-2021 antara lain adalah :

1. Peningkatan Kawasan yang Lestari dan Terlindungi sebanyak 5 Lokasi pada Tahun 2021 dengan rata-rata peningkatan 4,18%/tahun. Target Capaian sebagai berikut :

Tabel 11. Peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi tahun 2016 2021 (lokasi)

No	Indikator	Kondisi kinerja 2016	Target Capaian					Kondisi kinerja akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase Peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	(0%) 22 Lokasi	(5%) 23 Lokasi	(4%) 24 Lokasi	(4%) 25 Lokasi	(4%) 26 Lokasi	(4%) 27 Lokasi	(23%) 27 Lokasi

2. Peningkatan Produktivitas perikanan budidaya sebanyak 27,1 Ton/Ha/Th pada Tahun 2021 dengan Target Capaian sebagai berikut

Tabel 12. Produktivitas perikanan budidaya tahun 2016–2021 (Ton/Ha/Th)

No	Indikator	Kondisi kinerja 2016	Target capaian					Kondisi kinerja akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Produktivitas perikanan budidaya	24,2 Ton/Ha/Th	24,8 Ton/Ha/Th	25,3 Ton/Ha/Th	25,9 Ton/Ha/Th	26,5 Ton/Ha/Th	27,1 Ton/Ha/Th	27,1 Ton/Ha/Th

2. Peningkatan Produktivitas perikanan tangkap sebanyak 15,7 Ton/Alat Tangkap/Th pada Tahun 2021 dengan Target Capaian sebagai berikut :

Tabel 13. Produktivitas perikanan tangkap tahun 2016 – 2021 (Ton/Alat Tangkap/Th)

No	Indikator	Kondisi Kinerja 2016	Target capaian					Kondisi kinerja akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Produktivitas perikanan tangkap	13,9 Ton/Alat Tangkap/Th	14,2 Ton/Alat Tangkap/Th	14,6 Ton/Alat Tangkap/Th	14,9 Ton/Alat Tangkap/Th	15,2 Ton/Alat Tangkap/Th	15,7 Ton/Alat Tangkap/Th	15,7 Ton/Alat Tangkap/Th

4. Peningkatan Konsumsi ikan perkapita sebanyak 39,00 Kg/Kapita pada Tahun 2021 dengan Target Capaian sebagai berikut :

Tabel. 14. Konsumsi ikan perkapita tahun 2016-2021 (Kg/Kapita)

No	Indikator	Kondisi kinerja 2016	Target capaian					Kondisi kinerja Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Konsumsi ikan perkapita	35,00 Kg/Kapita	35,40 Kg/Kapita	36,00 Kg/Kapita	37,00 Kg/Kapita	38,00 Kg/Kapita	39,00 Kg/Kapita	39,00 Kg/Kapita

## **VIII. PENUTUP**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman dan acuan kerja segenap aparatur di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi baik yang bekerja di lingkup kantor Provinsi dan UPTD di daerah serta petugas teknis yang bekerja di lapangan.

Semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dapat terwujud apabila semua jajaran aparatur di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi antara lain meliputi Kepala Dinas, Sekretaris dan staf, para kepala bidang dan staf, kepala UPTD dan staf serta Kepala instalasi dan tenaga teknis pendamping di lapangan harus memiliki pemahaman/persepsi yang sama terhadap setiap Program/Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah dengan disiplin, kerja keras serta belajar dalam meningkatkan penguasaan IPTEK di bidang kelautan dan perikanan serta memberikan pelayanan/pembinaan prima kepada pelaku usaha perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah produk perikanan dengan komitmen bersama demi mewujudkan Jambi TUNTAS 2016-2021.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari sinergi dan kerjasama antara pihak terkait baik secara kelembagaan vertikal, kerjasama dan sinergi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota juga kerjasama dan sinergi dengan pemerintah pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta BAPPENAS, maupun pihak Komisi II DPRD dan DPD.

Sinergi dan kerjasama Horizontal adalah bekerja sama dan bermitra dengan kelembagaan Dinas lintas sektor seperti Dinas PU, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Balai POM, Bappeda, Biro SDA serta koordinasi/sinergi dengan jajaran legislatif DPRD Provinsi khususnya Komisi II.

Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi merupakan acuan dan indikator kinerja bagi kinerja Perangkat Daerah sebagai bahan Evaluasi pimpinan untuk mengukur tingkat keberhasilan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas.

Harapan kami agar Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi JAMBI 2016-2021, ditindak lanjuti oleh semua aparatur di jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dengan rincian rencana aksi harian, mingguan, bulanan dan tahunan sehingga menjadi acuan kerja yang terukur dan dipertanggung jawabkan kepada pimpinan.

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Tujuan **)	Sasaran **)	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Pembanding		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya ASN DKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Karyawan karyawan yang terampil		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	1,682,415,060	100	1,535,000,000	100	1,761,100,000	100	1,993,000,000	100	2,223,000,000	100	2,440,000,000	100	11,634,515,060	DKP	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk	12 bulan	12 bulan	46,680,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	11,500,000	12 bulan	13,000,000	12 bulan	14,000,000	12 bulan	16,000,000	12 bulan	111,180,000	DKP	
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening	12 bulan	12 bulan	497,922,400	12 bulan	520,000,000	12 bulan	596,600,000	12 bulan	673,000,000	12 bulan	750,000,000	12 bulan	827,000,000	12 bulan	3,864,522,400	DKP	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga administrasi keuangan (orang)	20 Orang	20 Orang	378,761,160	22 Orang	410,000,000	24 orang	470,000,000	35 orang	531,000,000	35 orang	600,000,000	35 orang	652,000,000	35 orang	3,041,761,160	DKP	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemaklitan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	60,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	35,000,000	12 bulan	39,000,000	12 bulan	44,000,000	12 bulan	48,000,000	12 bulan	256,000,000	DKP	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	40 paket	40 paket	145,133,500	40 paket	90,000,000	44 paket	104,000,000	46 paket	120,000,000	49 paket	130,000,000	55 paket	143,000,000	55 paket	732,133,500	DKP	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 paket	12 paket	55,392,500	12 paket	40,000,000	12 paket	46,000,000	14 paket	52,000,000	14 paket	57,000,000	16 paket	63,000,000	16 paket	313,392,500	DKP	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 paket	10 paket	13,400,500	10 paket	10,000,000	10 paket	12,000,000	10 paket	13,000,000	10 paket	14,000,000	10 paket	16,000,000	10 paket	78,400,500	DKP	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Paket	2 Kali	25,125,000	2 Paket	15,000,000	2 Kali	17,000,000	2 Kali	20,000,000	2 Kali	22,000,000	2 Kali	24,000,000	2 Kali	123,125,000	DKP	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	peyriyan makan dan minum (bulan)	12 bulan	12 bulan	60,000,000	12 bulan	60,000,000	12 bulan	69,000,000	12 bulan	78,000,000	12 bulan	87,000,000	12 bulan	95,000,000	12 bulan	449,000,000	DKP	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi (bulan)	12 bulan	12 bulan	400,000,000	12 bulan	350,000,000	12 bulan	400,000,000	12 bulan	454,000,000	12 bulan	505,000,000	12 bulan	556,000,000	12 bulan	2,665,000,000	DKP	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	100%	1,593,232,100	100%	1,570,000,000	100%	1,801,000,000	100%	1,887,124,000	100%	2,039,399,000	100%	2,239,202,000	100%	11,129,957,100	DKP	
				Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	-	-	-	-	-	-	4 unit	-	4 unit	-	4 unit	-	12 unit	-	DKP	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 buah	6 buah	88,620,000	-	-	-	-	8 buah	-	9 buah	-	10 buah	-	35 buah	88,620,000	DKP	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	-	-	-	6 paket	150,000,000	8 paket	172,000,000	9 paket	175,000,000	10 paket	180,000,000	11 paket	180,000,000	44 paket	857,000,000	DKP	
				Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	3 unit	-	DKP	
				Pengadaan meubelour	Jumlah pengadaan mebelour	8 paket	8 paket	161,508,000	6 paket	200,000,000	8 paket	230,000,000	5 paket	80,000,000	6 paket	100,000,000	7 paket	120,000,000	50 paket	891,508,000	DKP	
				Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer, Laptop, Printer, UPS, Gigsstore	5 unit	5 unit	165,619,000	5 unit	120,000,000	5 unit	137,000,000	16 unit	155,370,000	15 unit	173,055,000	15 unit	190,741,000	61 unit	941,785,000	DKP	
				Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	-	-	-	-	-	12 bulan	-	DKP									
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	115,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	115,000,000	12 bulan	129,475,000	12 bulan	144,213,000	12 bulan	158,951,000	12 bulan	762,639,000	DKP	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	615,145,100	12 bulan	600,000,000	12 bulan	688,000,000	12 bulan	778,853,000	12 bulan	865,279,000	12 bulan	953,706,000	12 bulan	4,500,983,100	DKP	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	DKP							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	9 paket	9 paket	97,900,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	115,000,000	12 bulan	129,475,000	12 bulan	144,213,000	12 bulan	158,951,000	12 bulan	745,539,000	DKP	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Rohabilisasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dirhab sedang/ berat	-	-	-	1 paket	100,000,000	2 unit	115,000,000	2 unit	180,000,000	2 unit	144,213,000	2 unit	158,951,000	8 unit	698,164,000	DKP	
				Rohabilisasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dirhab sedang/ berat	6 unit	6 paket	349,440,000	2 paket	200,000,000	8 paket	229,000,000	5 paket	258,951,000	7 paket	288,426,000	10 paket	317,902,000	38 paket	1,643,719,000	DKP	
				Rohabilisasi Sedang/Berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirhab sedang/ berat	-	-	-	0	-	2 unit	-	6 unit	-	DKP							
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase PWS yang disiplin (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>140,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>210,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>240,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>271,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>302,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>350,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,513,000,000</b>	<b>DKP</b>	
				Pengadaan Pakalan Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya	350 stel	350 stel	140,000,000	350 stel	210,000,000	350 stel	240,000,000	350 stel	271,000,000	350 stel	302,000,000	350 stel	350,000,000	350 stel	1,513,000,000	DKP	
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase sumberdaya aparatur berkompetensi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>263,140,000</b>	<b>100%</b>	<b>420,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>470,528,000</b>	<b>100%</b>	<b>521,056,000</b>	<b>100%</b>	<b>571,585,000</b>	<b>100%</b>	<b>622,113,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,868,422,000</b>	<b>DKP</b>	
				Penerimaan calon taruna STP	Jumlah taruna STP yang diterima	-	-	-	0	-	24 orang	-	26 orang	-	28 orang	-	30 orang	-	130 orang	-	DKP	
				Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	50 orang	150,000,000	60 orang	75,000,000	30 orang	155,000,000	40 orang	165,000,000	50 orang	175,000,000	60 orang	185,000,000	290 orang	905,000,000	DKP	
				Kegiatan penatausahaan kepegawatan	Jumlah pelaksanaan penatausahaan kepegawatan (kali)	1 kali	1 kali	113,140,000	1 kali	125,000,000	1 kali	143,422,000	1 kali	161,844,000	1 kali	180,266,000	1 kali	198,688,000	1 kali	922,360,000	DKP	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	2 kali	80,000,000	2 kali	91,790,000	2 kali	103,580,000	2 kali	115,370,000	2 kali	127,160,000	2 kali	517,900,000	DKP	
				Kegiatan penatausahaan kearsipan	Jumlah pelaksanaan penatausahaan kearsipan (kali)	-	-	-	1 paket	70,000,000	2 kali	80,316,000	2 kali	90,632,000	2 kali	100,949,000	2 kali	111,265,000	2 kali	453,162,000	DKP	
				Kegiatan Pendampingan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kegiatan Pendampingan	-	-	-	48 kali	70,000,000	2 kali	-	2 kali	70,000,000	DKP							
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>1,756,321,240</b>	<b>98%</b>	<b>1,340,883,000</b>	<b>98%</b>	<b>1,559,022,000</b>	<b>99%</b>	<b>1,802,163,000</b>	<b>99%</b>	<b>1,985,303,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,163,444,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,607,136,240</b>	<b>DKP</b>	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 laporan	9 laporan	284,134,000	9 laporan	200,000,000	9 laporan	250,000,000	9 laporan	325,000,000	9 laporan	340,000,000	9 laporan	350,000,000	9 laporan	1,749,134,000	DKP	
				Kegiatan Koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data statistik	Jumlah laporan Data statistik perikanan yang tersedia	12 Laporan	12 Laporan	818,544,000	12 Laporan	390,883,000	12 Laporan	448,490,000	12 Laporan	506,097,000	12 Laporan	563,705,000	12 Laporan	621,312,000	12 Laporan	3,349,031,000	DKP	
				Rancangan penyusunan program anggaran dan sinkronisasi program kegiatan SKPD	Jumlah dokumen rancangan penyusunan program anggaran kegiatan	5 dokumen	5 dokumen	295,672,240	5 dokumen	400,000,000	5 dokumen	458,951,000	5 dokumen	517,902,000	5 dokumen	576,853,000	5 dokumen	635,804,000	5 dokumen	2,885,182,240	DKP	
				Sinkronisasi program kegiatan SKPD	Jumlah rapat sinkronisasi program yang terlaksana	2 kali	2 kali	243,074,000	0	-	2 kali	243,074,000	DKP									
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Jumlah laporan movev pelaksanaan program kegiatan	-	-	-	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	229,475,000	12 Laporan	258,951,000	12 Laporan	288,426,000	12 Laporan	317,902,000	12 Laporan	1,294,754,000	DKP	
				Kegiatan Inventarisasi dan Penerimaan Aset	Jumlah Dokumen aset yang di inventaris	2 dokumen	2 dokumen	114,897,000	2 dokumen	150,000,000	2 dokumen	172,106,000	3 dokumen	194,213,000	3 dokumen	216,319,000	3 dokumen	238,426,000	3 dokumen	1,085,961,000	DKP	
1) Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta meningkatkan	1. Meningkatnya Pengelolaan dan pemulihan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persentase pemulihan kawasan mangrove		<b>PROGRAM PENGAWASAN SDKP, KONSERVASI DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR</b>	<b>Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi (%)</b>	<b>22 Lokasi</b>	<b>0</b>	<b>3,181,827,200</b>	<b>5</b>	<b>4,169,265,920</b>	<b>4%</b>	<b>4,073,188,000</b>	<b>4%</b>	<b>4,744,246,000</b>	<b>4%</b>	<b>5,210,040,000</b>	<b>4%</b>	<b>5,715,872,000</b>	<b>(23%) 27 Lokasi</b>	<b>27,094,459,120</b>	<b>DKP</b>	
	2. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan kasus pelanggaran		Kegiatan Perlindungan dan Konservasi/Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Reserval meningkat	22 Lokasi	22 Lokasi	1,058,194,000	23 Lokasi	1,000,000,000	24 Lokasi	1,147,377,000	25 Lokasi		26 Lokasi		27 Lokasi		27 Lokasi	3,205,571,000	DKP	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
kesejahteraan masyarakat pesisir	3. Meningkatnya peran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	persentase penurunan desa tertinggal di kawasan pesisir		Kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah Desa pesisir yang mendapat pelatihan	5 desa	5 desa	1.152.000.000	5 desa	1.000.000.000	5 desa	1.147.377.000	5 desa	-	5 desa	-	5 desa	-	5 desa	3.299.377.000	DKP			
	4. Meningkatnya pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan		Perda Rencana Zonasi Pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil		Kegiatan Pengawasan Terpadu Kelautan dan Perikanan	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	36 kali	36 kali	971.633.200	36 kali	1.050.000.000	36 kali	1.204.746.000	34 kali	1.259.492.000	36 kali	1.314.239.000	36 kali	1.368.985.000	36 kali	7.169.095.200	DKP		
2) Meningkatkan pengelolaan ruang laut				Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah dokumen Zonasi	-	-	-	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	573.688.000	1 dokumen	647.377.000	1 dokumen	721.066.000	1 dokumen	794.755.000	1 dokumen	3.236.886.000	DKP			
				Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Reservat meningkat	22 Lokasi							25 lokasi	1.147.377.000	26 lokasi	1.294.755.000	27 lokasi	1.442.132.000	27 lokasi	3.884.264.000	DKP			
				Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir	Jumlah Masyarakat Pesisir Yang Terbina								80 Orang	400.000.000	100 Orang	450.000.000	100 Orang	500.000.000	300 orang	1.350.000.000	DKP			
				Kegiatan Pengelolaan Instalasi Pendang Semurup Kerinci	Jumlah benih ikan lokal (ekor)			200.000 ekor	457.777.400				250.000 ekor	710.000.000	375.000 ekor	780.000.000	505.000 ekor	860.000.000	1.130.000 ekor	2.807.777.400	DKP			
				Kegiatan Pengelolaan Instalasi Thehok	Jumlah benih ikan lokal (ekor)			400.000 ekor	161.488.520				475.000 ekor	580.000.000	650.000 ekor	650.000.000	850.000 ekor	750.000.000	1.975.000 ekor	2.141.488.520	DKP			
1) Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1. Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan	Meningkatnya NTPi		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton/ha/Th)</b>	<b>21,1 ton/ha/Th</b>	<b>24,2 ton/ha/Th</b>	<b>10.459.463.800</b>	<b>24,8 ton/ha/Th</b>	<b>12.030.000.000</b>	<b>25,3 ton/ha/Th</b>	<b>5.736.881.000</b>	<b>25,9 ton/ha/Th</b>	<b>2.104.985.000</b>	<b>26,5 ton/ha/Th</b>	<b>2.424.985.000</b>	<b>27,1 ton/ha/Th</b>	<b>2.744.985.000</b>	<b>27,1 ton/ha/Th</b>	<b>35.501.299.800</b>	DKP			
				Kegiatan Pengembangan Budidaya Ikan di Sentra Produksi	Jumlah produksi perikanan budidaya di sentra produksi	30.084 Ton	34.484 ton	2.239.062.000	57.240 ton	<b>8.130.000.000</b>	60.674 ton	1.262.115.000	64.315 ton	-	68.174 ton	-	72.264 ton	-	72.264 ton	-	72.264 ton	11.631.177.000	DKP	
	2. Meningkatkan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya			Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya	Jumlah Pakdakan, UPR dan petugas BBI yang andal	900 Orang	900 Orang	125.744.000	900 Orang	141.000.000	900 Orang	161.780.000	920 Orang	-	920 Orang	428.524.000	DKP							
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya	130 paket	130 paket	441.692.000													130 paket	441.692.000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Perbenihan ikan komersil dan ikan lokal Jambi di UPTD BBID	Jumlah produksi benih ikan di BBID	2.500.000 ekor	2.500.000 ekor	1.957.695.800	1.600.000 ekor	675.000.000	1.600.000 ekor	774.479.000	1.600.000 ekor	-	1.600.000 ekor	3.407.174.800	DKP							
				Kegiatan Pengembangan Ikan Hias di UPTD BBID	Jumlah produksi benih ikan Hias di UPTD BBID	100.000 ekor	100.000 ekor	649.278.000	100.000 ekor	300.000.000	120.000 ekor	344.213.000	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000 ekor	1.293.491.000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Induk dan Benih UPTD BBIS Kerinci	Jumlah Produksi Induk dan benih ikan di BBIS kerinci	4.200 induk	4.200 induk	727.053.000	5.000 induk	1.100.000.000	5.000 induk	1.262.115.000	5.000 induk	-	5.000 induk	3.089.168.000	DKP							
					Jumlah Produksi benih ikan di BBIS Kerinci	5.500.000 benih	5.500.000 benih	1.696.457.000	3.000.000 benih		3.000.000 benih	-	3.000.000 benih	1.696.457.000	DKP									
				Kegiatan Pengembangan ikan Semah	Jumlah Induk ikan semah	1.544 induk	1.560 induk	253.758.000	1.580 induk	375.000.000	1.600 induk	430.266.000	1.620 induk	-	1.640 induk	-	1.660 induk	-	1.660 induk	-	1.660 induk	1.059.024.000	DKP	
					Jumlah benih ikan semah	60.000 benih	60.000 benih	592.102.000	70.000 benih		80.000 benih	-	90.000 benih	-	95.000 benih	-	100.000 benih	-	100.000 benih	-	100.000 benih	592.102.000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Budidaya Air Payau	Jumlah produksi Air Payau	642 ton	736 ton	200.160.000													200.160.000	DKP		
				Kegiatan Pengembangan Minapoltan	Jumlah produksi di kawasan minapoltan	14.672 ton	16.818 ton	567.676.000													567.676.000	DKP		
				Kegiatan Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan Wanita Pembudidaya Ikan dan Pemuda Kreatif	Jumlah Kelompok Pembudidaya Wanita dan Pemuda Kreatif	1.712 ton	1.962 ton	444.020.000	20 kelompok	112.000.000	20 kelompok	128.506.000	20 kelompok	-	20 kelompok	684.526.000	DKP							
				Kegiatan Pengembangan dan Pelatihan Perikanan budidaya di pondok pesantren, Lembaga Pemasyarakatan, Sekolah dan TNI/Polri	Jumlah lokasi pondok pesantren, LP, sekolah dan TNI/Polri yang dbina				4 Lembaga	112.000.000	4 Lembaga	128.506.000	4 Lembaga	-	4 Lembaga	240.506.000	DKP							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya di Kawasan Mandiri Pangan	Jumlah perikanan di kawasan mandiri pangan	-	-	-	11 kawasan	150,000,000	11 kawasan	172,106,000	11 kawasan	-	11 kawasan	-	11 kawasan	-	11 kawasan	322,106,000	DKP	
				Kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	50 sampel	50 sampel	564,766,000	50 Sampel	225,000,000	50 Sampel	258,159,000	50 Sampel	625,000,000	50 Sampel	745,000,000	50 Sampel	865,000,000	50 Sampel	3,282,925,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya	Jumlah kawasan yang dibangun	-	-	-	5 kawasan	150,000,000	5 kawasan	172,106,000	5 kawasan	-	5 kawasan	-	5 kawasan	-	5 kawasan	322,106,000	DKP	
				Pengembangan dan Penguatan Modal usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok yang mendapat pinjaman	-	-	-	6 kelompok	110,000,000	6 kelompok	126,211,000	6 kelompok	-	6 kelompok	-	6 kelompok	-	6 kelompok	236,211,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Mutu Pakan	Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	-	-	-	10 jenis	300,000,000	10 jenis	344,213,000	10 jenis	-	10 jenis	-	10 jenis	-	10 jenis	644,213,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Jumlah BIMTEK Perikanan Budidaya	-	-	-	2 paket	150,000,000	2 paket	172,106,000	2 paket	-	2 paket	-	2 paket	-	2 paket	322,106,000	DKP	
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	285	752,050,000	335	852,050,000	385	952,050,000	1005	2,556,150,000		
				Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Mutu Pakan Perikanan Budidaya	Jenis pakan yang beredar sesuai standar (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	6	727,935,000	8	827,935,000	10	927,935,000	24	2,483,805,000		
1) Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1. Meningkatkan pendapatan nelayan	Meningkatnya NTN		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Produktivitas perikanan tangkap (Ton/lat tangkap/Thn)</b>	<b>13,0 ton/lat tangkap/Thn</b>	<b>13,9 ton/lat tangkap/Thn</b>	<b>5,497,178,500</b>	<b>14,2 ton/lat tangkap/Thn</b>	<b>4,230,000,000</b>	<b>14,6 ton/lat tangkap/Thn</b>	<b>4,853,403,000</b>	<b>14,9 ton/lat tangkap/Thn</b>	<b>4,337,888,500</b>	<b>15,2 ton/lat tangkap/Thn</b>	<b>4,895,535,000</b>	<b>15,7 ton/lat tangkap/Thn</b>	<b>5,423,080,500</b>	<b>15,7 ton/lat tangkap/Thn</b>	<b>23,445,366,500</b>	DKP	
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Aktifitas UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana di PPP Kuala Tungkal	70 %	70 %	2,265,423,300	75 %	1,000,000,000	80 %	1,147,377,000	85 %	-	90%	-	95 %	-	95 %	4,412,800,300	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah Alat Tangkap	2,694 unit	3,600 Unit	2,304,341,200	4,000 unit	1,350,000,000	4,300 unit	1,548,959,000	4,400 unit	1,747,919,000	4,500 unit	1,946,879,000	4,600 unit	2,145,838,000	4,600 unit	11,043,936,200	DKP	
				Kegiatan Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan	Jumlah Produksi	51,109 ton	58,690 ton	279,207,000	60,979 ton	427,000,000	63,010 ton	489,930,000	65,108 ton	552,860,000	67,276 ton	615,790,000	70,000 ton	678,720,000	70,000 ton	3,043,507,000	DKP	
				Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan	Jumlah Pemacuan stock Ikan Perairan Umum	200,000 ekor	300,000 ekor	518,897,000	300,000 ekor	654,000,000	500,000 ekor	750,384,000	600,000 ekor	700,000 ekor	800,000 ekor	800,000 ekor	800,000 ekor	800,000 ekor	800,000 ekor	1,923,281,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan minipolitan tangkap	Jumlah nelayan yang dibina	35 orang	40 Orang	129,310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,310,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan kawasan perikanan tangkap	Jumlah kawasan yang terbina	-	-	-	3 kawasan	200,000,000	50 Orang	229,475,000	55 Orang	-	60 Orang	-	65 Orang	-	65 Orang	429,475,000	DKP	
				Kegiatan kesyahbandaran dan pengembangan pelabuhan perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan Ikan	-	-	-	3 pelabuhan	327,000,000	3 pelabuhan	375,192,000	3 pelabuhan	3 pelabuhan	3 pelabuhan	3 pelabuhan	3 pelabuhan	3 pelabuhan	3 pelabuhan	702,192,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Nelayan	Jumlah Bimtek Perikanan Tangkap	-	-	-	4 Kali	272,000,000	4 Kali	312,086,000	4 Kali	352,173,000	4 Kali	392,260,000	4 Kali	432,346,000	4 Kali	1,760,865,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Kapal Yang Mendarat di PPP Kuala Tungkal	Persentase Peningkatan Kapal Yang Mendarat di PPP Kuala Tungkal	30%	-	-	-	-	-	-	35%	1,147,377,000	40%	1,294,755,000	45%	1,442,132,000	45%	-	-	-
				Kegiatan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal	Persentase Peningkatan kapal yang laal administrasi kesyahbandaran	10%	-	-	-	-	-	-	20%	375,192,000	30%	423,384,000	40%	471,577,000	40%	-	-	-
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Instalasi PPI Nipah Panjang	Persentase Peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	15%	-	-	-	-	-	-	15%	162,367,500	20%	222,467,000	30%	252,467,500	30%	-	-	-
1) Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan per kapita	1. Meningkatkan mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan UMKM dan Industri	Meningkatnya Konsumsi Ikan Per Kapita		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Konsumsi Ikan Perkapita (Kg/Kapita/Thn)</b>	<b>34,00 Kg/Kapita/Thn</b>	<b>35,00 kg/kapita/Thn</b>	<b>2,632,768,000</b>	<b>35,40 kg/kapita/Thn</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>36,00 kg/kapita/Thn</b>	<b>3,499,999,200</b>	<b>37,00 kg/kapita/Thn</b>	<b>4,566,428,300</b>	<b>38,00 kg/kapita/Thn</b>	<b>5,080,977,300</b>	<b>39,00 kg/kapita/Thn</b>	<b>5,645,527,300</b>	<b>39,00 kg/kapita/Thn</b>	<b>23,925,700,100</b>	DKP	
				Kegiatan Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan	Jumlah Promosi dan Publikasi Kegiatan Perikanan	25 kali	31 Kali	736,808,000	31 Kali	730,000,000	35 kali	837,585,000	38 kali	-	40 kali	-	42 kali	-	42 Kali	2,304,393,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Jumlah fasilitas sarana informasi pasar	1 paket	1 paket	198,458,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198,458,000	DKP	
				Kegiatan Pemasaran	Jumlah suplier	40 orang	40 orang	85,053,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,053,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah dokumen informasi pemasaran	-	-	-	1 dokumen	261,000,000	1 dokumen	299,465,000	1 dokumen	337,931,000	1 dokumen	376,396,000	1 dokumen	414,862,000	1 dokumen	1,689,654,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Unit Pengalihan Ikan (UPI)	Jumlah produksi UPI	4,050 ton	4,120 ton	760,416,000	4,200 ton	728,000,000	4,400 ton	835,290,000	4,600 ton	942,581,000	4,800 ton	1,049,872,000	5,000 ton	1,157,163,000	5,000 ton	5,473,322,000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Kegiatan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil perikanan (LPPMHP)	Jumlah pengujian Mutu Hasil Perikanan (kali)				7 kali	156,000,000	7 kali	178,990,000	7 kali		7 kali		7 kali		7 kali	334,990,000	DKP	
				Kegiatan Peningkatan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Terbilnya dokumen SKP	2 dokumen	2 dokumen	383,415,000	2 dokumen	365,000,000	4 dokumen	418,792,000	5 dokumen		6 dokumen		7 dokumen		7 dokumen	1,167,207,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah UMKM yg bankable	5 UMKM	5 UMKM	468,618,000	5 UMKM	260,000,000	5 UMKM	298,318,000	5 UMKM		5 UMKM		5 UMKM		5 UMKM	1,026,936,000	DKP	
				Kegiatan Pengelolaan Instalasi Ikan Hias Taman Angrek	Jumlah Benih Ikan Hias						120,000 ekor	168,769,200							120,000 ekor	168,769,200	DKP	
				Kegiatan Promosi dan Publikasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Promosi dan Publikasi Kegiatan Perikanan	25 kali							28 kali	1,343,058,500	30 kali	1,443,058,500	32 kali	1,543,058,500	32 kali	4,329,175,500	DKP	
				Pengembangan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)	Jumlah sarana dan prasarana UPTD PMHP						4 paket	462,790,000							4 paket	462,790,000	DKP	
				Kegiatan Pelayanan dan Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di UPTD PMHP	Jumlah Pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan								20 sampel	361,626,700	40 sampel	411,626,700	60 sampel	461,626,700	60 sampel	1,234,880,100	DKP	
				Kegiatan Pengelolaan Instalasi Ikan Hias Telanaipura	Jumlah Benih Ikan Hias								100,000 ekor	721,122,100	130,000 ekor	761,122,100	100,000 ekor	831,122,100	330,000 ekor	2,313,366,300	DKP	
				Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan di UPTD PMHP	Jumlah uji coba teknologi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan								5 kali	250,306,000	10 kali	325,306,000	20 kali	390,306,000	20 kali	965,918,000	DKP	
				Kegiatan Pembinaan Mutu	Jumlah Dokumen SKP								23 dokumen	472,585,000	25 dokumen	526,378,000	26 dokumen	580,171,000	74 dokumen	1,579,134,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah Ragam Produk								36 ragam	137,218,000	38 ragam	187,218,000	40 ragam	267,218,000	40 ragam	591,654,000	DKP	
				<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>27,206,345,900</b>		<b>28,005,148,920</b>		<b>23,995,121,200</b>		<b>22,227,890,800</b>		<b>24,732,844,300</b>		<b>27,344,223,800</b>		<b>147,719,855,920</b>		